



MEMBANGUN KOLABORASI DAN INOVASI

LAPORAN TAHUNAN 2021

Daftar Isi

04		Kata Pengantar Direktur Eksekutif
05		Tentang MDPI
06		Highlights
08		Wilayah Kerja MDPI
10		Pengelolaan Perikanan Berbasis Partisipasi
12		Program Observer
13		Penelitian Estimasi Jumlah dan Lokasi Rumpon
14		Penelitian <i>Permanent Drop-Stone</i>
15		Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)
16		Pertemuan Regional III KPBP
18		Jangkauan dan Capaian MDPI
20		Merintis Kemandirian Masyarakat Pesisir
22		Perempuan dalam Perikanan dan Pengembangan Ekonomi
24		Meningkatkan Literasi Keuangan Rumah Tangga
26		Implementasi Fair Trade: Perancangan Wastewater Garden
28		Nelayan untuk Perikanan Berkelanjutan: “Mari Rehat Sehari”
30		Penggerak Ekosistem Perikanan
34		Sewindu MDPI Melaju
37		Operasional & Keuangan

Laporan Tahunan 2021 MDPI
© 2022 MDPI. Hak Cipta Dilindungi.

Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
Ruko Istana Regency Blok S No.7
Jl. Bypass Ngurah Rai, Pesanggaran
Denpasar 80223, Bali, Indonesia
Phone: (+62 361) 471 9020
Email: info@mdpi.or.id
www.mdpi.or.id

 Masyarakat Dan Perikanan Indonesia
 @mdpi_foundation
 @MDPIIndonesia
 Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
 Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia

Kami bangga dapat terus menjaga hubungan dengan masyarakat dampingan kami secara mendalam. Kami terus berinovasi mencari cara baru untuk terus berkolaborasi, berkumpul dan tetap terhubung satu sama lain. ”

Yasmine Simbolon
Direktur MDPI



KATA PENGANTAR

Setelah melewati tantangan di tahun 2020, tahun 2021 menjadi titik di mana MDPI harus melakukan transisi dan adaptasi tujuan program. Meski harus tertunda, MDPI tetap berusaha dan mampu menjalankan kegiatan tanpa adanya dampak negatif terhadap keseluruhan program dan kami bersyukur tahun ini telah membuat kami lebih terinspirasi dan termotivasi untuk bekerja.

Walau pandemi global melanda, kami bangga dapat terus menjaga hubungan dengan masyarakat dampingan kami secara mendalam, meski dengan cara yang berbeda. Kami terus berinovasi mencari cara baru untuk terus berkolaborasi, berkumpul dan tetap terhubung satu sama lain. Tahun 2021 menyoroti pentingnya perikanan berkelanjutan untuk mata pencaharian masyarakat pesisir, juga pentingnya kepemimpinan dan tata kelola daerah yang kuat. MDPI terus mempertahankan fokus program sehingga berhasil membawa kemajuan dalam berbagai aspek dan tetap menjadi mitra pelaksana yang terpercaya.

Seiring dengan keberadaan kami yang terus meningkat di sektor perikanan skala kecil, kami menyadari pentingnya menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan yang lebih global. Memasuki tahun kedelapan berdampingan dengan masyarakat pesisir di Indonesia bagian timur, kami terus berkontribusi pada *Sustainable Development Goals*, dengan menaruh fokus pada pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tahun ini kami menerapkan strategi intervensi baru, memupuk kerja sama di antara para nelayan dan

pemangku kepentingan lainnya, memberdayakan masyarakat pesisir, memperluas cakupan pengelolaan bersama, memfasilitasi diskusi seputar perikanan berkelanjutan, memperkuat upaya pengumpulan data perikanan, juga berkontribusi pada pengembangan hingga sosialisasi kebijakan nasional.

Dalam rangka merayakan ulang tahun kedelapan, MDPI menyelenggarakan tiga webinar yang berhasil menjangkau masyarakat umum secara lebih luas. Siapa menyangka, beberapa acara dan kegiatan yang harus berubah dari konvensional ke digital, ternyata terbukti efektif dalam menjangkau lebih banyak orang di ragam wilayah provinsi di Indonesia.

Sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan di tengah keluarga masyarakat pesisir, MDPI menciptakan permainan simulasi keuangan “*Si Keong Nelayan*” yang menawarkan metode pembelajaran secara lebih mendalam namun menyenangkan. Kami berharap permainan ini dapat turut membangun interaksi yang lebih dinamis antar anggota masyarakat dalam memahami topik rumit seputar manajemen keuangan.

Ke depannya MDPI akan terus memperkuat hubungan di tingkat lokal dan nasional, bekerja dengan para mitra baru, sembari terus membangun kapasitas tim kami.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para donatur, mitra, dan seluruh keluarga besar MDPI atas dukungan yang terus diberikan bagi pemberdayaan masyarakat pesisir. - Jaz



VISI

Mata pencaharian yang berkelanjutan di masyarakat pesisir dan pengelolaan perikanan yang efektif di Indonesia.

MISI

Memberdayakan masyarakat pesisir di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan perikanan, memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan keberlanjutan mata pencaharian penangkapan ikan.

MDPI didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan untuk mendorong kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kesejahteraan komunitas nelayan dan sumber daya perikanan di seluruh Indonesia.

Happy People, Many Fish!

Organisasi kami dibentuk atas dasar kepercayaan yang sederhana: bahwa masyarakat perikanan yang berdaya dan terjamin secara finansial adalah kunci dalam mencapai perikanan berkelanjutan. Kami bekerja di sektor perikanan skala kecil demi mendorong rantai pasok perikanan yang berkelanjutan, adil dan dapat dilacak. MDPI bertujuan untuk mendapatkan hasil jangka panjang yang nyata dan dapat bertahan dalam kelompok masyarakat yang kami libatkan.



HIGHLIGHTS

Membawa ketelusuran ke Sumbawa

MDPI bermitra dengan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia dalam mengembangkan sistem ketelusuran perikanan kerapu-kakap di perairan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat. Di tahun 2021, hasil dari uji coba teknologi ketelusuran yang dilakukan telah mendata sebanyak 19 total perjalanan oleh 11 kapal nelayan, dengan total tangkapan yang mencapai 278 kg dari 126 ekor ikan kakap dan kerapu.

Membangun pahlawan lokal untuk perikanan berkelanjutan

Sebagai pembukaan dari program champion yang diluncurkan tahun 2021, MDPI mengadakan “Sarasehan Virtual” pada April bersama 30 nelayan calon Champion di wilayah kerja MDPI. Tujuan dari acara ini adalah mempertemukan antar calon champion, menyediakan wadah berdiskusi dan berjejaring satu dengan yang lain sebelum memasuki tahap implementasi kegiatan yang akan mendorong praktik perikanan berkelanjutan demi menopang kesejahteraan masyarakat pesisir. Selengkapnya di halaman 20.

Pengembangan ekonomi pesisir melalui Koperasi Nelayan

Demi mendukung kemajuan komunitas nelayan dan pemeran industri perikanan skala kecil lainnya, MDPI turut menjalankan program pembentukan Koperasi Nelayan sebagai salah satu bentuk pengembangan sosial-ekonomi nelayan skala kecil. MDPI juga memberikan Pelatihan Manajemen Organisasi dan Pembukuan kepada pengurus koperasi, untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi serta pencatatan, baik administrasi koperasi maupun usaha yang dijalankan. Di tahun 2021, MDPI telah memfasilitasi pembentukan 10 Koperasi dan 15 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tersebar di Bone, Sulawesi Selatan; Buru, Maluku; Toli-Toli, Sulawesi Tengah; Ternate dan Sanana, Maluku Utara. Selengkapnya di halaman 22.

Wilayah baru: Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Setelah hampir 3 tahun menjalankan program pengumpulan data perikanan (port sampling) di Kota Manado, pada Juli 2021 kantor lapangan MDPI resmi berpindah ke Desa Minaesa di Kabupaten Minahasa Utara. Dikenal sebagai domisili nelayan tuna pancing ulur yang juga peduli terhadap kelestarian sumber daya alam, desa ini dinilai berpotensi menjadi panutan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di Provinsi Nyiur Melambai.



Perkenalkan: Talawaan Bajo Mandiri

Kelompok terbaru di bawah dampingan MDPI ini terbentuk pada Oktober 2021 dengan beranggotakan 18 nelayan tuna pancing ulur yang ingin membangun ekonomi mandiri dan mengembangkan desa mereka. Adanya kemajuan signifikan dalam pengorganisasian dan pengelolaan dana membuat para nelayan turunan Suku Bajo tersebut makin semangat mengembangkan unit bisnis budidaya Ikan Kuwe melalui sistem Keramba Jaring Apung (KJA) di tahun yang akan datang.

Wadah diskusi daring untuk nelayan skala kecil

Pandemi COVID-19 telah membuka lebih banyak peluang untuk secara virtual menghubungkan nelayan skala kecil dengan semua orang, seperti melalui webinar, yang juga memungkinkan MDPI menjangkau lebih banyak orang di berbagai daerah lainnya. Dalam rangka ulang tahun MDPI ke-8, kami mengadakan serangkaian webinar seputar pengelolaan perikanan di Indonesia. Selengkapnya di halaman 34.

Mengenal nelayan tuna di Pulau Buru bersama MSC Indonesia

Bertepatan dengan momentum Hari Perikanan Dunia tahun ini, Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia mengunjungi Pulau Buru, Maluku, lokasi perikanan tuna handline pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi ecolabel tersebut. Menampilkan salah satu nelayan champion MDPI, tim MSC menggarap dokumenter singkat mengenai pemegang sertifikat di Maluku, juga melihat keseharian para nelayan kecil di Pulau Buru. Tonton videonya di YouTube MDPI: youtube.com/mdpifoundation.



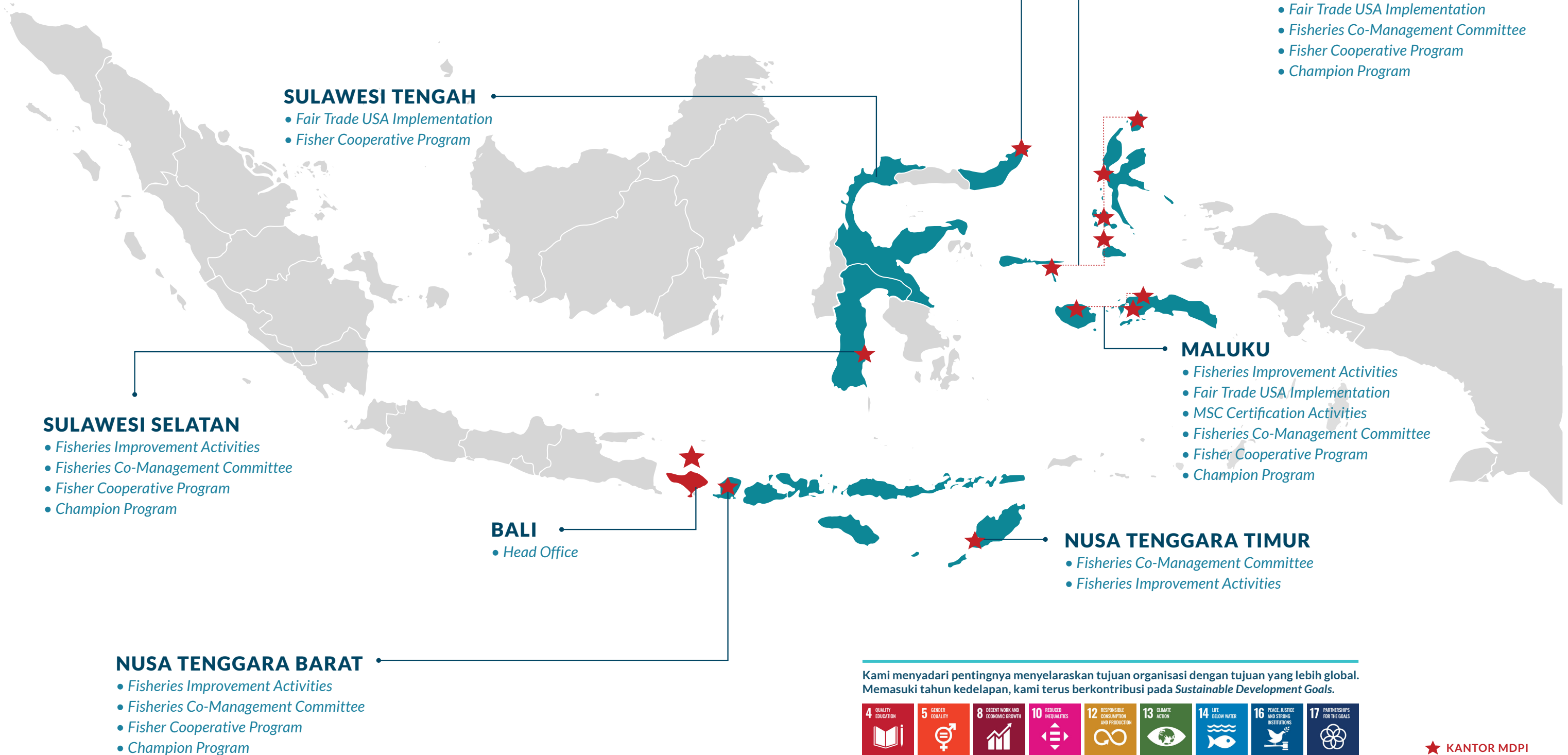
Harvest Strategy: mengelola perikanan Indonesia secara berkelanjutan

MDPI turut berperan dalam implementasi Harvest Strategy dan kegiatan Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) khususnya Western and Central Pacific Fisheries Commission dan Indian Ocean Tuna Commission. Untuk *harvest strategy*, MDPI merupakan penyedia data perikanan tuna handline skala kecil dan turut mendukung pelaksanaan koordinasi lokakarya secara berkala. Di sisi lain, MDPI mendukung kegiatan RFMO dengan menyediakan data komposisi hasil tangkapan tahunan perikanan tuna handline yang digunakan untuk menentukan komposisi hasil tangkapan dari jenis alat tangkap tersebut, khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan 713, 714, 715. Selengkapnya di halaman 10.

MDPI ON THE MAP

WILAYAH KERJA

MDPI memiliki pengalaman mendalam di bidang pengelolaan perikanan, khususnya di wilayah Indonesia timur, dengan implementasi kegiatan di 7 provinsi. Kami bekerja demi menjamin hasil jangka panjang yang nyata dan dapat bertahan dalam kelompok masyarakat yang kami libatkan, melalui beragam pelatihan hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.





PENGELOLAAN BERBASIS PARTISIPASI: UPAYA BERSAMA MENJAGA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA

Tuna merupakan sediaan ikan beruaya jauh, sehingga pengelolaannya melampaui batas wilayah yurisdiksi beberapa negara. Upaya bersama dalam pengelolaan sumber daya tuna oleh beberapa negara yang berdekatan dilakukan melalui Kerjasama regional yakni melalui Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) tuna. Indonesia merupakan anggota penuh dari 3 (tiga) RFMO yakni: Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) untuk perairan Pasifik Barat dan Tengah; Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) untuk wilayah perairan Samudra Hindia, dan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) khusus untuk pengelolaan tuna sirip biru selatan. Sebagai negara anggota RFMO, Indonesia berkewajiban untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan tindakan pengelolaan yang telah diadopsi oleh RFMOs dan dalam konteks perairan kepulauan Indonesia, juga harus menerapkan tindakan pengelolaan yang kompatibel dengan RFMO.

Strategi Pemanfaatan atau Harvest Strategy (HS) adalah kerangka kerja tindakan pengelolaan untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Strategi ini berbeda di setiap negara dan diadopsi oleh seluruh dunia (Fisheries Queensland, 2018). Dengan adanya strategi pemanfaatan, negara dapat menyesuaikan tingkat penangkapan ikan untuk memenuhi tujuan pengelolaan yang diinginkan. Untuk perairan kepulauan Indonesia, tindakan pengelolaan yang diadopsi termasuk pembatasan rumpon, penutupan spasial, hingga pengaturan jumlah hari melaut, jumlah kapal, dan jumlah penangkapan.

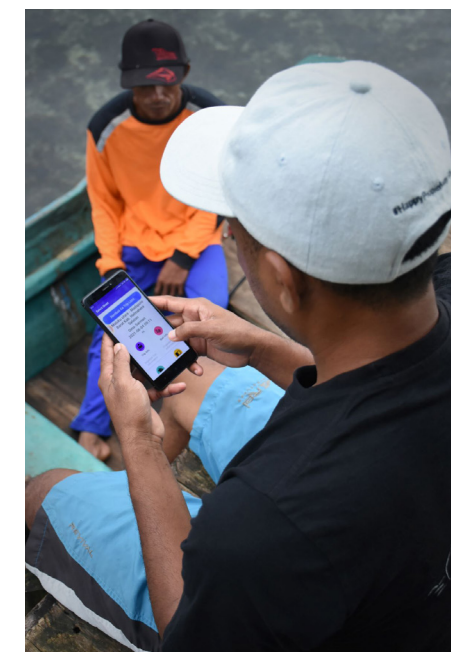
Untuk harvest strategy, MDPI merupakan penyedia data perikanan tuna handline skala kecil dan turut mendukung pelaksanaan koordinasi lokakarya secara berkala. Partisipasi dalam berbagai lokakarya merupakan kesempatan bagi MDPI untuk memberikan saran teknis dalam lingkup pengelolaan tuna yang lebih luas.

Sejak 2013, MDPI aktif melakukan *port sampling data collection* untuk perikanan tuna pancing ulur di bagian timur Indonesia. Data dikumpulkan dari enam provinsi wilayah kerja MDPI menggunakan berbagai metode, termasuk pengisian logbook nelayan dan implementasi teknologi. Data yang terkumpul dianalisis setiap enam bulan kemudian dibagikan kepada mitra.

Di tahun 2021, MDPI terhitung telah mengumpulkan sampel data dari 324.582 kg ikan, dengan didukung data dari Time Lapse Camera dan Reolink Camera pada 99 kapal dengan total trip 322 kali, Spot Trace pada 94 kapal dengan total trip 281 kali, dan Pelagic Data System pada 34 kapal dengan total trip 117 kali. Seluruh data yang dikumpulkan oleh enumerator langsung terhubung dengan I-Fish database, sebuah sistem yang dikembangkan MDPI untuk menyimpan dan berbagi data seputar perikanan skala kecil. Data primer kemudian dibagikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan mitra lainnya melalui databse I-Fish MDPI untuk mendukung data perikanan nasional, termasuk sebagai kebutuhan penyusunan Harvest Strategy Tuna di Indonesia.

Dari segi pengisian logbook nelayan, konsistensi pencatatan hasil tangkapan turut dikawal melalui pengisian logbook selepas pulang melaut, bahkan seringkali dilengkapi oleh para istri nelayan yang juga aktif membantu dalam hal pencatatan data perikanan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan standar sertifikasi perikanan tangkap sekaligus membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang efektif sehubungan dengan pengelolaan perikanan nasional. Sebab, dari data yang terkumpul sejauh ini, terlihat pula bahwa ukuran tuna hasil tangkapan beberapa tahun terakhir telah menurun; selain mengharuskan nelayan melakukan perjalanan lebih jauh, hal ini juga mengakibatkan hari melaut yang lebih lama dan adanya peningkatan biaya bahan bakar.

Dalam proses pengumpulan data, MDPI terus berupaya untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, salah satunya melalui agenda rutin internal dan eksternal untuk melakukan peninjauan kembali dan verifikasi data perikanan yang telah dikumpulkan dari 10 wilayah kerja MDPI. Di pertengahan tahun, MDPI memfasilitasi Lokakarya Reviu dan Verifikasi Data I-Fish 2021 untum membahas hasil data I-Fish per provinsi periode 2020-Juni 2021. Berjalan selama 2 hari, pertemuan juga membahas serangkaian materi sehubungan dengan pengelolaan perikanan termasuk analisis tindakan pengelolaan perikanan, rekomendasi hasil technical data harvest strategy di Indonesia, hasil Program Observer KKP-MDPI, dan hasil kegiatan inventarisasi rumpon yang dilakukan oleh MDPI. Di akhir kegiatan, para peserta diberikan tutorial cara mengakses data di sistem I-Fish.



Di sisi lain, MDPI mendukung kegiatan RFMO dengan menyediakan data komposisi hasil tangkapan tahunan perikanan tuna handline, yang digunakan untuk menentukan komposisi hasil tangkapan dari jenis alat tangkap tersebut, khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan 713, 714, 715. Dalam hal ini, total tangkapan tahunan akan disediakan oleh tim Satu Data KKP. Selanjutnya, MDPI juga berkontribusi pertemuan tahunan WCPFC seperti Pertemuan Teknis dan Kepatuhan serta Pertemuan Tahunan Komisi.

Dalam mengelola perikanan secara berkelanjutan dan terukur, pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai program dan riset. MDPI pun turut mengambil andil dalam mendukung terwujudnya pengelolaan perikanan yang lebih efektif, termasuk memfasilitasi penempatan observer di atas kapal nelayan dan terlibat dalam riset terkait rumpon di wilayah perairan Indonesia timur.



PEMANTAU & PENELITI UNTUK KEBERLANJUTAN

Untuk lebih meningkatkan kualitas data, MDPI turut mendukung pelaksanaan program *observer on-board* yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya di wilayah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, NTB, dan NTT.

Observer, atau pemantau, ditempatkan pada kapal tuna pancing ulur ≤ 30 GT di beberapa wilayah kerja MDPI untuk mencatat aktivitas penangkapan ikan di laut, termasuk identifikasi hasil tangkapan nelayan. Data yang dikumpulkan pemantau turut menjadi pendukung dalam proses verifikasi data yang dikumpulkan oleh enumerator di darat dan yang terekam melalui teknologi di atas kapal. Demi terus menjaga konsistensi kualitas data, mereka diberikan pelatihan secara rutin.

Para observer juga mengamati cara penanganan ikan di atas kapal agar dapat membantu upaya peningkatan kualitas ikan yang dihasilkan nelayan. Di samping itu, mereka juga membantu aktivasi logbook perikanan di komunitas nelayan dan memberikan dampingan dalam proses pengisiannya.

Iwan, seorang lulusan Politeknik Perikanan Kalimantan, mulai menjalani tugasnya bersama KKP pada tahun 2021 di Maluku, tepatnya wilayah kerja MDPI di Pulau Buru. Selain mencatat data perikanan, ia turut terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk menyelamatkan satwa yang dilindungi dan sosialisasi di desa. Selama

menjalankan masa tugasnya, Iwan mengaku mendapati berbagai pengalaman menarik saat melaut bersama nelayan, termasuk melihat seekor hiu yang tersangkut pancingan nelayan. "Saat sedang memancing tuna, mata pancing nelayan tidak sengaja termakan oleh hiu," ungkap *observer* muda ini. "Hal seperti ini terkadang terjadi saat melaut, namun berkat pelatihan seputar spesies terancam dan dilindungi, ternyata para nelayan di Pulau Buru sudah paham bahwa hiu merupakan satwa penting dan harus dilepas."

Sebagai seorang *observer* yang memiliki pengalaman memantau di berbagai jenis ukuran kapal, Iwan pun menyadari bahwa perikanan skala kecil, khususnya metode *handline* yang diterapkan nelayan tuna di Pulau Buru, merupakan perikanan yang sangat selektif. Para nelayan hanya menangkap ikan target tangkapan dan melepaskan spesies lainnya yang tertangkap dengan tidak sengaja, sehingga turut meminimalisir tangkapan sampingan (*bycatch*).

Sejauh ini, para *observer* telah melakukan sebanyak 250 hari perjalanan bersama 8.923 nelayan tuna *handline*. Program *Observer* turut menjadi hal penting dalam membantu pemerintah mengetahui kondisi di lapangan secara lebih mendalam. Selain mendukung proses verifikasi dan validasi data, para pemantau juga mengumpulkan informasi tentang perikanan *handline* yang belum diketahui banyak orang.



Riset Estimasi Jumlah dan Lokasi Rumpon Laut Dalam Tetap di WPPNRI 713, 714 dan 715 dilakukan sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan *Harvest Strategy*. Berlangsung selama 8 bulan pada Februari-September 2021 bersama Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN), riset ini merupakan tindak lanjut dari salah satu *management measure harvest strategy*, yaitu pembatasan penggunaan rumpon atau *fish aggregating devices* (FADs). Tujuan riset ini adalah untuk mendeskripsi dinamika perikanan tuna yang berasosiasi dengan rumpon dan karakter teknis rumpon yang digunakan nelayan tuna, serta mengestimasi jumlah dan posisi rumpon yang dipasang nelayan tuna di wilayah perairan ini.

Hasil riset menunjukkan bahwa ada tiga perikanan tuna di wilayah perairan tersebut yang berasosiasi dengan rumpon, termasuk pukat cincin (*purse seine*), huhate (*pole and line*) dan kombinasi pancing ulur dengan pancing tonda (*hand line-troll line*), hingga jenis rumpon berjangkar. Sedangkan untuk jumlah rumpon laut dalam di atas jarak 12 *nautical mile* di WPPNRI 713, 714 dan 715 diestimasi sebanyak 1.560 dengan sebaran masing-masing 661 unit, 608 unit dan 291 unit.

Ke depannya, hasil riset ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) untuk meningkatkan pengelolaan rumpon dan sebagai studi awal untuk mengetahui jumlah rumpon yang telah terpasang. Sehingga diharapkan agar terus dilakukan inventarisasi jumlah rumpon melalui sistem perizinan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Pendaftaran ulang terhadap rumpon (*rumpon amnesty*) yang terpasang merupakan salah satu langkah awal yang dapat dikerjakan sehingga diketahui secara pasti mengenai jumlah dan posisi rumpon yang terpasang saat ini. Hal ini demi memastikan bahwa rumpon yang dipasang telah sesuai dengan ketentuan regulasi pengelolaan sumberdaya ikan tuna yang bersifat nasional, regional, dan internasional.



UJI COBA INOVASI: PERMANENT DROP-STONE

Saat ini, nelayan tuna pancing ulur semakin bergantung pada batu sebagai alat pemberat saat melepaskan umpan dan dijatuhkan ke laut, sebuah metode yang dikenal juga dengan istilah *drop-stone*.

Dalam satu hari, seorang nelayan bisa menurunkan hingga 40 butir batu yang dapat berdampak pada ekosistem dasar laut. Bersama Pusat Penelitian Perikanan (PUSRISKAN) dan Balai Riset Perikanan Laut (BRPL), MDPI tengah mencari solusi melalui penelitian dan uji coba penggunaan *permanent drop-stone* (PDS), sebuah pengganti pemberat batu atau semen beton.

Sebagai langkah tindak lanjut dari diskusi bersama PUSRISKAN dan AP2HI pada bulan September 2021, MDPI memulai penelitian untuk menerapkan PDS dengan melihat tingkat keberhasilan dan jumlah lilitan yang terjadi saat melaukukan uji coba. Dilakukan pertama kali di Desa Tehoru, Pulau Seram Provinsi Maluku bersama 3 nelayan menggunakan 150 set umpan, penelitian metode penangkapan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi: menekan biaya pencarian batu dan pengangkutannya, serta mengurangi beban kapal saat melaut. Selain itu, desain PDS juga dapat difungsikan sebagai atraktor ikan tuna dan meningkatkan probabilitas tangkapan ikan.

Nelayan Tehoru sendiri dinilai memiliki ketertarikan tinggi terhadap penelitian ini. Nelayan *champion* MDPI Muhamad Silawane dan La Tohia aktif mendukung penggunaan PDS sebagai langkah pelestarian ekosistem. Mereka berkomitmen melanjutkan penggunaan PDS saat memancing di kedalaman 50-70 meter dengan menyiapkan peralatan dan menyediakan sarana kapal sebagai tempat uji coba penggunaan PDS.

Sandi Wibowo selaku salah satu peneliti utama yang terjun langsung ke lapangan mengatakan nelayan Tehoru menyesuaikan desain PDS dengan bentuk *drop-stone* yang biasa mereka gunakan. Selama kegiatan penelitian, mereka juga aktif memberikan masukan kreatif dan evaluasi terhadap uji coba ini.

“Pengembangan metode penangkapan ikan dengan menggunakan PDS juga berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai alternatif penangkapan ikan tuna yang lebih efisien dan memperkecil dampak lingkungan dari kelangkaan batu akibat kebutuhan nelayan untuk penangkapan ikan,” ungkapnya.

Hasil penelitian kemudian dipaparkan dan ditinjau pada bulan Desember di Jakarta bersama *stakeholder* terkait, termasuk Bapak La Tohia. Dalam kesempatan ini, beliau mengusulkan instrumen tambahan sebagai pengganti *helper*, yaitu semacam trol yang bisa diturunkan bersamaan dengan senar umpan, demi efisiensi waktu dan tenaga saat melakukan proses penangkapan ikan di atas kapal. Sebagai salah satu nelayan yang terlibat langsung dalam implementasi uji coba, beliau terbukti cukup percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan masukan teknis di tengah perwakilan kementerian dan akademisi yang hadir.

Di tahun 2022, penelitian lanjutan akan diarahkan pada pengembangan alat bantu pengoperasian PDS agar memudahkan nelayan didalam pengeoperasiannya.



MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DENGAN SISTEM TELUSUR DAN LOGISTIK IKAN NASIONAL (STELINA)

Perikanan yang ilegal dan tidak teratur, atau dikenal juga sebagai *illegal, unreported and unregulated fishing* (IUUF) adalah isu penting yang harus menjadi perhatian seluruh mata rantai pasok produk perikanan. Pasar internasional pun kini wajib memastikan bahwa produk perikanan yang diperdagangkan tidak terkait dengan aktivitas IUUF. Oleh sebab itu, industri perikanan membutuhkan dukungan sistem yang dapat menjamin keterkaitan data dan informasi dari hulu ke hilir, guna menjamin produk perikanan yang dapat ditelusuri.

Menanggapi kondisi ini, sejak tahun 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan STELINA, sebuah platform digital yang dapat memudahkan dan mendukung eksportir dalam memenuhi syarat ketelusuran di negara destinasi. Melalui sistem ini, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) ingin menjaga daya saing produk perikanan Indonesia di pasar domestik dan pasar global. Kebijakan negara tujuan ekspor pun menuntut penguatan ketelusuran melalui sistem elektronik, sehingga pengembangan STELINA menjadi sangat penting sebagai perangkat *Electronic Catch*

Documentation and Traceability (eCDT) di tingkat nasional. Sebagai organisasi yang memiliki pengalaman dalam sistem ketelusuran, MDPI turut aktif berkolaborasi dengan KKP dalam proses pengembangan STELINA. Pada Juni 2021 MDPI turut memfasilitasi Pertemuan Penyusunan Peta Jalan Pelaksanaan STELINA tahun 2021-2024 yang membahas gambaran rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ditjen PDSPKP beserta seluruh mitra kerja selama tiga tahun ke depan.

Saat ini, platform digital STELINA tengah diimplementasikan sebagai *pilot project* di beberapa perusahaan perikanan Indonesia, termasuk Unit Pengolah Ikan yang bekerja berdampingan dengan MDPI. Perusahaan pada umumnya memiliki sistem pencatatan ketelusuran mandiri untuk informasi ketelusuran produk mereka, namun sistem informasi setiap perusahaan memiliki format yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan beberapa peningkatan fitur, termasuk keamanan data perikanan perusahaan, jika ingin mengintegrasikan sistem perusahaan ke platform STELINA agar dapat menjadikan STELINA sebagai platform terpusat untuk data perikanan dari hulu ke hilir.



PERIKANAN KECIL DI PANGGUNG BESAR: PERTEMUAN REGIONAL III KPBP

Pertemuan Regional Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) Tuna menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk bersinergi mewujudkan pemanfaatan sumber daya tuna secara berkelanjutan dan terukur, khususnya di wilayah perairan Indonesia timur.

KPBP yang dibentuk di enam provinsi tempat MDPI bekerja mengadakan Pertemuan Reguler dua kali setahun di tingkat provinsi, sebelum berkumpul di Pertemuan Regional tahunan di Jakarta. Selain perwakilan KPBP, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertama diadakan pada 2019 sebanyak 2 kali, pertemuan ketiga berlangsung pada 15 Desember 2021 setelah tertunda akibat pandemi di tahun sebelumnya.

Dihadiri dan dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dengan gabungan peserta daring dan luring, Pertemuan Regional III menyoroti beberapa isu, di antaranya pengelolaan perikanan

berkelanjutan di Indonesia, langkah pengelolaan yang harus tetap memperhatikan kebutuhan nelayan kecil, dan pengaturan rumpon di WPPNRI 713, 714 dan 715. Pada kesempatan ini, Menteri Trenggono menyampaikan bahwa penerapan ekonomi biru di subsektor perikanan tangkap dapat dilakukan melalui kegiatan penangkapan ikan terukur. Selain itu, dilaksanakan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi.

“Saya meminta agar komite pengelola perikanan tuna ini dapat bekerja bersama mengawal penangkapan ikan terukur. Kita harus bisa *rebound* dan bersinergi untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan dunia dan



“ Saya meminta agar komite pengelola perikanan tuna ini dapat bekerja bersama mengawal penangkapan ikan terukur.

- Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia

menjadi tulang punggung perekonomian bangsa,” ujarnya saat membuka kegiatan tahunan ini di Ballroom Gedung Mina Bahari III KKP.

Secara umum, KPBP merupakan wadah bagi *stakeholder* tuna untuk berkolaborasi, berdiskusi, bernegosiasi, berkonsultasi dan bersepakat, dalam rangka mendukung pemerintah mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di tingkat provinsi, topik diskusi Pertemuan Reguler berbeda satu dengan lainnya, disesuaikan dengan situasi dan isu yang dihadapi setiap komite di daerah, serta kebijakan nasional yang mempengaruhi kegiatan penangkapan tuna nelayan kecil di wilayah tersebut.

Selain itu, KPBP turut membahas tantangan pengelolaan perikanan tuna yang dihadapi daerah dan mengupayakan kolaborasi dalam menyusun rencana pengelolaan perikanan tuna yang efektif di tingkat provinsi.

Forum inklusif ini melibatkan pemangku kepentingan perikanan yang pada umumnya jarang dilibatkan, seperti para nelayan kecil dan pemasok *mini-plant*. Bersama dengan perwakilan pemerintah, industri, asosiasi, akademisi, peneliti hingga LSM, para nelayan kecil ikut mendapat kesempatan terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengelolaan perikanan di Indonesia.

Di tahun 2021, Pertemuan Reguler KPBP di enam provinsi dihadiri oleh sebanyak total 409 peserta daring dan luring, 64 di antaranya merupakan perwakilan nelayan kecil, sedangkan Pertemuan Regional III dihadiri secara langsung oleh sebanyak 246 peserta.

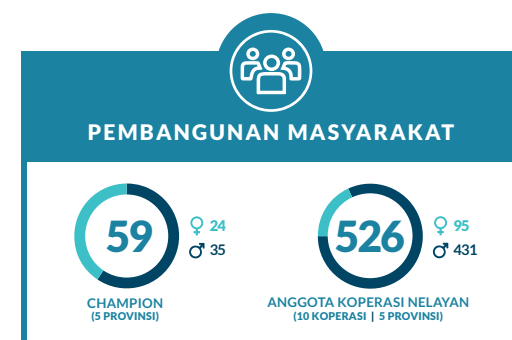
PANDUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BERSAMA

Dalam upaya untuk terus mendukung pengelolaan perikanan tuna secara berkelanjutan di tingkat provinsi, maka telah diterbitkan “Buku Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna” yang telah disempurnakan serta disahkan dan ditandatangani oleh enam Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yakni Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT dan NTB pada tahun 2021.

MDPI ON THE MAP

JANGKAUAN & CAPAIAN

Dengan diluncurkannya strategi baru untuk implementasi program tahun 2020-2025, pengelolaan perikanan terus diupayakan termasuk melalui pengumpulan data, pemberdayaan masyarakat, dan beragam pelatihan peningkatan kapasitas untuk masyarakat pesisir di Indonesia timur.



Kegiatan di Tolitoli diawali pada tahun 2015 saat implementasi program Fair Trade (FT) USA dimulai, didukung juga oleh program pengumpulan data perikanan pada tahun 2016. Selama 2021, pekerjaan MDPI mencakup 1 kelompok nelayan di 1 desa.

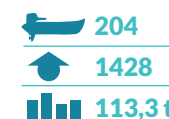


Pada pertengahan 2021 MDPI memindahkan kantor lapangan dari Kota Manado ke Kabupaten Minahasa Utara, mencakup 1 desa. Seluruh kegiatan turut mendukung upaya pengelolaan bersama dan pembangunan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kapasitas dan pengumpulan data perikanan di 2 landing site, termasuk di Kota Manado, dan secara langsung mendampingi sekitar 33 nelayan.

Melalui pengelolaan bersama data perikanan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan adanya dukungan dari pemerintah, MDPI turut terlibat dalam perbaikan perikanan skala kecil di Kabupaten Bone. Sejak 2012, masyarakat aktif diberikan informasi seputar perikanan skala kecil yang kemudian diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan pemerintah.

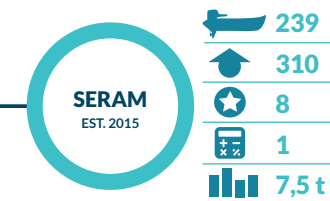


Wilayah kerja pertama MDPI yang telah masuk dalam cakupan pengumpulan data dan menjadi tempat bertemunya nelayan dan pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengetahuan. Di tahun 2021, MDPI menjalankan kegiatan pengorganisasian masyarakat, turut mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat untuk 2000+ nelayan.

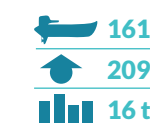


Potensi perikanan tuna NTT penting untuk dikelola secara efektif. Saat awal berdiri, MDPI tinggal bersama nelayan, menjadi bagian dari komunitas mereka dan terus menerapkan rangkaian *best practice* di tengah masyarakat, turut mendukung pengumpulan data di 1 desa dan landing site, juga peningkatan kapasitas untuk dapat terlibat aktif dalam upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan.

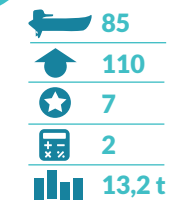
Sejak mulai menerapkan standar FT USA di tahun 2015, di tahun 2021 MDPI bekerja dengan 6 kelompok nelayan di 6 desa dan secara langsung mendampingi 200+ nelayan. Kegiatan pengumpulan data perikanan juga terus dijalankan demi mendukung upaya pengelolaan perikanan di Maluku.



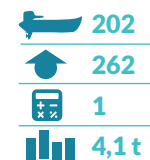
Pekerjaan MDPI di Buru telah berjalan lebih dari 8 tahun dan menjadi wilayah kerja pertama yang berhasil mendapatkan 2 *eco-label*: sertifikasi FT USA dan MSC. Mencakup 8 desa dan 14 kelompok nelayan, di tahun 2021 MDPI mendampingi 290 nelayan, 10 pemasok dan 1 unit pengolahan ikan, serta memfasilitasi pengembangan 2 koperasi nelayan.



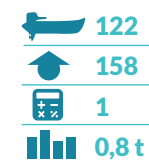
Sumber daya perikanan Morotai berperan penting bagi rantai pasok. Berbagai program dijalankan demi mendukung rencana pengelolaan tuna, termasuk pekerjaan MDPI yang mencakup pendampingan dan data collection di 1 desa, 1 landing site dan telah menjangkau 200+ nelayan.



Kantor MDPI Ternate didirikan untuk memperluas jangkauan implementasi FT USA dan pengumpulan data perikanan di Maluku Utara. Pada tahun 2021 pekerjaan MDPI mencakup 4 kelompok nelayan di 3 desa dan mendampingi 110 nelayan.



Pekerjaan MDPI mencakup 3 desa dan 4 landing site, mendampingi 200+ nelayan dari 5 kelompok di Pulau Bisa & Pulau Bacan. Sejak menerapkan standar FT USA, program lain seperti data collection juga dijalankan demi mendukung upaya pengelolaan perikanan.



Hasil tuna yang melimpah membuat Kepulauan Sula menjadi lokasi potensial untuk program perikanan berkelanjutan, beberapa di antaranya mencakup implementasi FT USA dan data collection. Program kerja MDPI telah berjalan lebih dari 3 tahun di 2 desa dan melibatkan 150+ nelayan dampingan dari 5 kelompok.



MERINTIS KEMANDIRIAN MASYARAKAT PESISIR



Selama 8 tahun membina dan mengembangkan kapasitas lebih dari 500 nelayan skala kecil di Indonesia timur, MDPI terus membangun kepemimpinan dan kemandirian masyarakat pesisir. Sejak 2020, MDPI menjadikan pengorganisasian masyarakat sebagai salah satu fokus utama dalam mendukung terwujudnya perikanan berkelanjutan.

Melalui program **Fisheries Community Organization (FCO)**, MDPI berdampingan dengan komunitas nelayan dalam upaya pengembangan kapasitas masyarakat, penguatan organisasi, hingga pembentukan koperasi nelayan. Saat ini, MDPI mendampingi lebih dari 40 kelompok nelayan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dan tengah memperluas jangkauan pengorganisasian masyarakat di setiap provinsi yang menjadi wilayah kerja MDPI.

Seiring dengan berjalannya program FCO, di tahun 2020 MDPI mulai menggarap program Champion, dengan harapan dapat melahirkan pahlawan lokal

yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan di desanya masing-masing, juga sebagai penggerak utama perikanan berkelanjutan di desa mereka. Resmi diluncurkan pada April 2021 melalui acara sarasehan virtual, Program Champion MDPI saat ini melibatkan 30 anggota komunitas pesisir yang tersebar di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain nelayan, tokoh perempuan dan anak muda juga turut bergerak sebagai pembawa perubahan di desa mereka, dengan berbagai ide dan program yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun sosial kemasyarakatan. Para Champion diberikan pendampingan secara individu

(one-on-one coaching) dan serangkaian pelatihan untuk meningkatkan soft skill mereka. Beberapa materi edukasi disusun untuk mendukung berjalannya praktik perikanan berkelanjutan, melalui materi dasar seperti pelestarian lingkungan dan sumber daya alam, juga materi inti seperti satwa dilindungi, legalitas kapal, pentingnya data dan logbook, jenis alat tangkap yang berbahaya, peraturan terkait *fishing ground*, pengelolaan sampah, dan pelestarian wilayah pesisir.

Peran aktif para agen perubahan di desa pun sejauh ini telah membuahkan hasil nyata; mereka kini tengah menjalankan beberapa program unggulan di desanya masing-masing, antara lain pembentukan koperasi nelayan dan perumusan Peraturan Desa. Melalui program unggulan ini, masyarakat desa dapat merintis kemandirian ekonomi dengan menjalankan unit usaha koperasi dan menjaga lingkungan melalui penyusunan Peraturan Desa terkait pengelolaan sampah.



NELAYAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA

Setelah dikukuhkan menjadi koperasi, para nelayan di Desa Seruni Mumbul menjalin kemitraan dengan Bank Sampah setempat, sebagai upaya menjaga kebersihan sekaligus mendapat pemasukan tambahan. Program Bank Sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah secara kolektif yang menggerakkan masyarakat untuk memilah sampah di sekitar mereka, kemudian akan dibeli dan diangkut oleh operator Bank Sampah. Program yang telah dilakukan oleh warga sejak akhir Maret 2021 ini memberikan keuntungan tidak hanya bagi lingkungan, namun bagi warga setempat yang mendapatkan penghasilan tambahan.

Selain menggerakkan masyarakat, keberadaan *Champion* juga diperlukan untuk meningkatkan kolaborasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam menjalankan upaya pengembangan desa. Salah satu upaya yang telah dilakukan *Champion* adalah memanfaatkan dana desa untuk menyusun Peraturan Desa terkait pengelolaan sampah di Desa Tehoru, Maluku Tengah. Proses pembuatan Peraturan Desa dimulai dari asesmen di masyarakat, Focus Group Discussion (FGD), konsultasi publik, hingga mencapai pengesahan peraturan. Peraturan yang telah disahkan kemudian akan disosialisasikan kepada masyarakat untuk memaksimalkan jangkauan dan kepatuhan terhadap aturan yang diberlakukan. Beberapa usulan poin Peraturan Desa yang disampaikan *Champion* pada FGD terkait penggunaan dana desa pun saat ini telah resmi tertuang dalam anggaran desa. Saat ini MDPI tengah mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu Konsultasi Publik untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait usulan peraturan, demi menciptakan perundang-undangan yang berkualitas.



MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN

DALAM PERIKANAN & PENGEMBANGAN EKONOMI PESISIR

Pengelolaan perikanan tuna secara berkelanjutan dan pengembangan ekonomi pesisir pun tidak lepas dari peranan aktif perempuan. MDPI meyakini bahwa partisipasi tokoh perempuan mampu membawa perubahan, demi perikanan yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi pesisir yang lebih luas ke depannya.

Dengan adanya keterlibatan perempuan, berbagai upaya dan tujuan pengelolaan dapat tercapai, termasuk dalam hal pengumpulan data perikanan hingga pembukuan dalam menjalankan usaha. Di Ternate, Maluku Utara, masyarakat Desa Jambula perlahan sadar akan pentingnya pendataan, lebih lagi keterlibatan perempuan di dalamnya. Kegiatan rapat bulanan kelompok nelayan Fair Trade pun turut rutin dihadiri oleh para istri nelayan; selain mendapatkan kesempatan bertukar pikiran, mereka ikut terlibat dalam pengambilan keputusan kelompok. Selain itu, mereka mendapatkan berbagai informasi yang menambah wawasan terkait rencana pengelolaan perikanan nasional.

Dari sisi jual beli ikan, para istri nelayan juga ikut membantu proses transport ikan dari lokasi pendaratan

ke gudang supplier, menjual ikan hasil tangkapan lainnya di pasar sekitar, hingga menjadi bendahara koperasi nelayan yang saat ini menjalankan usaha jual beli tersendiri.

Sejak 2020, pengembangan Kelompok Usaha Bisnis (KUB) dan pembentukan koperasi nelayan di wilayah kerja MDPI mulai diakselerasi demi membantu para nelayan di tengah kerumitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. KUB sendiri menjadi landasan awal dalam mengembangkan usaha dan memantapkan kemandirian kelompok, serta menjadi salah satu upaya untuk mempermudah nelayan dalam mengakses berbagai keperluan alat tangkap. Pembentukan KUB juga menjadi fondasi untuk membangun sebuah koperasi nelayan, mengingat pengembangan koperasi membutuhkan



kemantapan pengelolaan kelompok dan kesiapan diri setiap anggota di dalamnya. Beberapa faktor penting ini kerap membuat kelompok nelayan berpikir panjang untuk mengubah status dari KUB menjadi koperasi, seperti yang dialami kelompok nelayan di Lombok Timur, NTB yang terbentuk pada tahun 2013 dan akhirnya dikukuhkan sebagai Koperasi Harapan Jaya Bersama pada September 2021.

Saat ini, para istri nelayan di Lombok Timur turut memanfaatkan koperasi sebagai wadah untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam berorganisasi, pembukuan, dan meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui pengembangan usaha. Hal serupa juga dilakukan oleh istri nelayan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang menjadi sorotan masyarakat sekitar karena telah berhasil mengembangkan koperasi di Kelurahan Toro sejak 2020. Perempuan di Kelurahan Toro menjadi salah satu pendorong terbesar dalam proses pembentukan Koperasi Kembali Muda Mandiri dan akan mewakili koperasi dalam menyampaikan capaian kerja dalam Rapat Anggota Tahunan pada Februari 2022.

Dengan terus membangun kapasitas dan kepercayaan diri seluruh pengurus beserta anggota kelompok, didukung dengan bantuan dana hibah sebagai modal awal pembentukan koperasi, sejauh ini MDPI telah memfasilitasi pembentukan 9 Koperasi dengan 500 anggota dan 15 KUB beranggotakan 246 orang, termasuk di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Kehadiran koperasi merupakan salah satu solusi untuk terus memperbaiki kehidupan kelompok masyarakat pesisir dan turut menjadi sumber pendapatan alternatif saat nelayan tidak bisa melaut, contohnya melalui usaha jual-beli ikan, usaha simpan-pinjam, dan usaha pendukung lainnya seperti berdagang alat tangkap, sembako hingga bahan bakar minyak. Dengan adanya koperasi, diharapkan juga akses terhadap modal usaha maupun akses pendampingan dan pelatihan peningkatan kapasitas anggota dan lembaga dapat semakin terbuka serta mudah dijangkau para nelayan.



MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN RUMAH TANGGA



Pelatihan literasi keuangan turut menjadi bagian dari materi yang diusung dalam proses pengembangan kapasitas Champion, sekaligus untuk terus meningkatkan peranan perempuan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Pelatihan literasi keuangan diberikan kepada rumah tangga nelayan agar lebih paham dalam mengelola keuangan dengan melakukan perencanaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini dan menabung untuk masa depan, baik yang terencana seperti menyekolahkan anak, membangun rumah, dan memperbaharui mesin kapal, maupun kejadian yang tidak terencana seperti sakit, bencana alam, pandemi global, dan lain sebagainya.

Setelah mendapatkan pemahaman pengelolaan keuangan secara mendalam, diharapkan mereka juga mampu mengelola usaha kecil yang bisa menopang perekonomian rumah tangga. Ke depannya, MDPI akan turut mendampingi pengembangan industri kecil yang dapat dipasarkan melalui koperasi nelayan yang telah terbentuk, demi terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi.



SI KEONG NELAYAN: SIMULASI KELOLA OEANG NELAYAN

Di akhir tahun 2021, tim MDPI menyusun sebuah permainan bertajuk “Si Keong Nelayan” yang akan menjadi salah satu media pendukung untuk meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat pesisir di seluruh wilayah dampingan MDPI di bagian timur Indonesia. Sebagai langkah persiapan, MDPI membekali dan memperkaya kapasitas tim pendamping melalui Training of Trainer (ToT) yang diselenggarakan di Bali pada Desember 2021, melibatkan 16 staf MDPI. Berbeda dari ToT pada umumnya, format pelatihan ini turut mendorong keterlibatan aktif dari tim MDPI dalam proses pengembangan konsep permainan literasi keuangan yang akan diaplikasikan di masyarakat.

Dengan dampingan tim MDPI, permainan yang akan didaftarkan sebagai hak cipta MDPI ini telah diuji coba di beberapa rumah tangga nelayan di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara untuk mendapatkan masukan terkait teknis, ritme, dan tambahan lainnya, guna menyempurnakan permainan ini. Pelatihan literasi keuangan diharapkan dapat membantu rumah tangga nelayan dalam mempelajari dan memahami pengelolaan keuangan sekaligus tentang perikanan berkelanjutan, dengan metode pelatihan menarik dan inkonvensional.



MELAUT LEBIH TENANG, AMAN, NYAMAN MENDUKUNG LEGALITAS & KESELAMATAN NELAYAN

Dalam melawan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF), legalitas nelayan menjadi aspek penting yang harus diatur, mulai dari kartu identitas, asuransi, hingga dokumen registrasi kapal nelayan. Sebagai upaya mendata jumlah nelayan di Indonesia, kini para nelayan diharuskan memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang juga berfungsi sebagai kartu identitas nelayan. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), MDPI turut memfasilitasi proses pendaftaran KUSUKA bagi nelayan di wilayah dampingan. Saat ini jumlah total E-KUSUKA yang telah terdistribusi adalah sebanyak 427 kartu, dan demi mempermudah proses pendaftaran ke depannya, di tahun 2021 MDPI mengajukan pembuatan akun pendaftaran resmi kepada KKP agar input data nelayan dampingan dapat secara langsung dilakukan oleh tim MDPI. Di samping KUSUKA individual, MDPI juga memfasilitasi pendaftaran KUSUKA Korporasi untuk koperasi nelayan dan saat ini 4 dari 10 koperasi nelayan dampingan MDPI termasuk di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan telah memiliki KUSUKA Korporasi yang dapat mempermudah proses pelayanan dari pemerintah, termasuk dalam mengakses bantuan pemerintah.



Bersama dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), MDPI juga membantu nelayan kecil di seluruh wilayah dampingan dalam proses pendaftaran kapal. Pengukuran kapal secara rutin dilakukan bersama nelayan dampingan MDPI dan merupakan tahap paling penting untuk mendapatkan dokumen Pas Kecil dan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP). Antara 2018 hingga 2021, MDPI bersama Kantor UPP telah melakukan pengukuran sebanyak total 1894 kapal nelayan skala kecil seukuran 1-20 GT di wilayah kerja MDPI. Selain membantu pemerintah dalam mendata dan memverifikasi kapal-kapal yang ada di perairan Indonesia, dokumen kepemilikan kapal turut berperan dalam meningkatkan keselamatan nelayan, mengingat beberapa elemen dari proses pendaftaran kapal termasuk memastikan kondisi fisik kapal dan kelengkapan peralatan di kapal.

Profesi nelayan yang memiliki risiko tinggi pun membuat asuransi menjadi penting untuk dimiliki. Tingginya angka kecelakaan yang terjadi saat melaut turut mendorong KKP dan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dalam memulai program bantuan premi untuk pemegang asuransi nelayan di tahun pertama. Kini MDPI terus mengupayakan keberlanjutan asuransi bagi nelayan dampingan, khususnya bagi 384 nelayan Fair Trade yang dapat mengalokasikan Dana Premium dari hasil penjualan ikan untuk membayar asuransi secara mandiri.

Di samping itu, sebagai penunjang keselamatan yang utama, pengetahuan dasar keselamatan di laut (*safety at sea*) juga merupakan hal penting yang harus dimiliki nelayan. Menyadari hal ini, MDPI bersama Badan Search and Rescue Nasional turut memfasilitasi pelatihan keselamatan di laut untuk nelayan. Selain mendapatkan perlengkapan standar seperti jaket pelampung, para nelayan juga mendapatkan materi mengenai dasar navigasi dan pertolongan pertama, baik di darat maupun di air. Di tahun 2021, MDPI memfasilitasi sebanyak 4 pelatihan untuk 133 nelayan dampingan di Maluku dan Maluku Utara. Ke depannya, program Pelatihan Dasar Keselamatan di Laut (Basic Safety at Sea Training) akan diadopsi oleh KKP sebagai agenda rutin yang dijalankan untuk kelompok nelayan di Indonesia.



WASTEWATER GARDEN

Salah satu standar perikanan tangkap Fair Trade USA adalah rantai pasok (*supplier*) mampu mengelola air limbahnya. Upaya yang bisa dilakukan salah satunya dengan membuat *wastewater garden* (WWG), sebuah sistem pengelolaan yang menggunakan proses alami untuk menjawab masalah lingkungan. WWG menggunakan tumbuh-tumbuhan, mikroba dan kerikil sebagai filter alami, sehingga saat air dilepas ke laut sudah dalam keadaan bersih. Sistem dari WWG ini adalah air limbah ditampung dalam *septic tank* yang terisolasi (sehingga air tidak merembes ke tanah), untuk selanjutnya disalurkan ke tangki pengolahan limbah lainnya yang ditanami dengan tumbuh-tumbuhan. Air limbah ini kaya akan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Keuntungan dari WWG adalah tidak menimbulkan bau dan tidak menjadi tempat bersarang nyamuk karena sistem air limbah yang tertutup.



NELAYAN FAIR TRADE & BMKG

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama Komite Nelayan Fair Trade (FT) Ternate-Tobelo menggelar perjanjian kerja sama untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan para nelayan di laut. Kerja sama yang terbentuk sejak Juni 2021 tersebut merupakan upaya untuk memperluas jangkauan program dari BMKG terkait pemanfaatan informasi cuaca dan iklim secara efektif dalam kegiatan perikanan. Melalui kerja sama ini, para nelayan khususnya nelayan FT Ternate-Tobelo dapat mengetahui informasi kondisi perkiraan cuaca, ketinggian ombak, hingga lokasi penangkapan ikan sebelum mereka pergi melaut. Papan informasi terkait cuaca laut juga dipasang di tiga wilayah domisili para nelayan FT dengan harapan dapat memudahkan nelayan lainnya, khususnya yang tidak memiliki perangkat atau akses internet, untuk dapat menerima informasi terbaru.

PELATIHAN ORGANISASI

Dalam upaya meningkatkan pemahaman standar Fair Trade kepada kelompok nelayan yang baru terbentuk, MDPI mengadakan Pelatihan Organisasi dan Pembukuan, dengan turut melibatkan pengurus kelompok dan perwakilan komite di Maluku dan Maluku Utara. Sepanjang tahun 2021, sebanyak enam kelompok baru di dua wilayah tersebut mengikuti Pelatihan Organisasi ini untuk membantu meningkatkan kapasitas nelayan terkait pemahaman Fair Trade, manajemen organisasi, komunikasi dalam kelompok, resolusi konflik, manajemen Dana Premium, dan pembukuan kelompok.



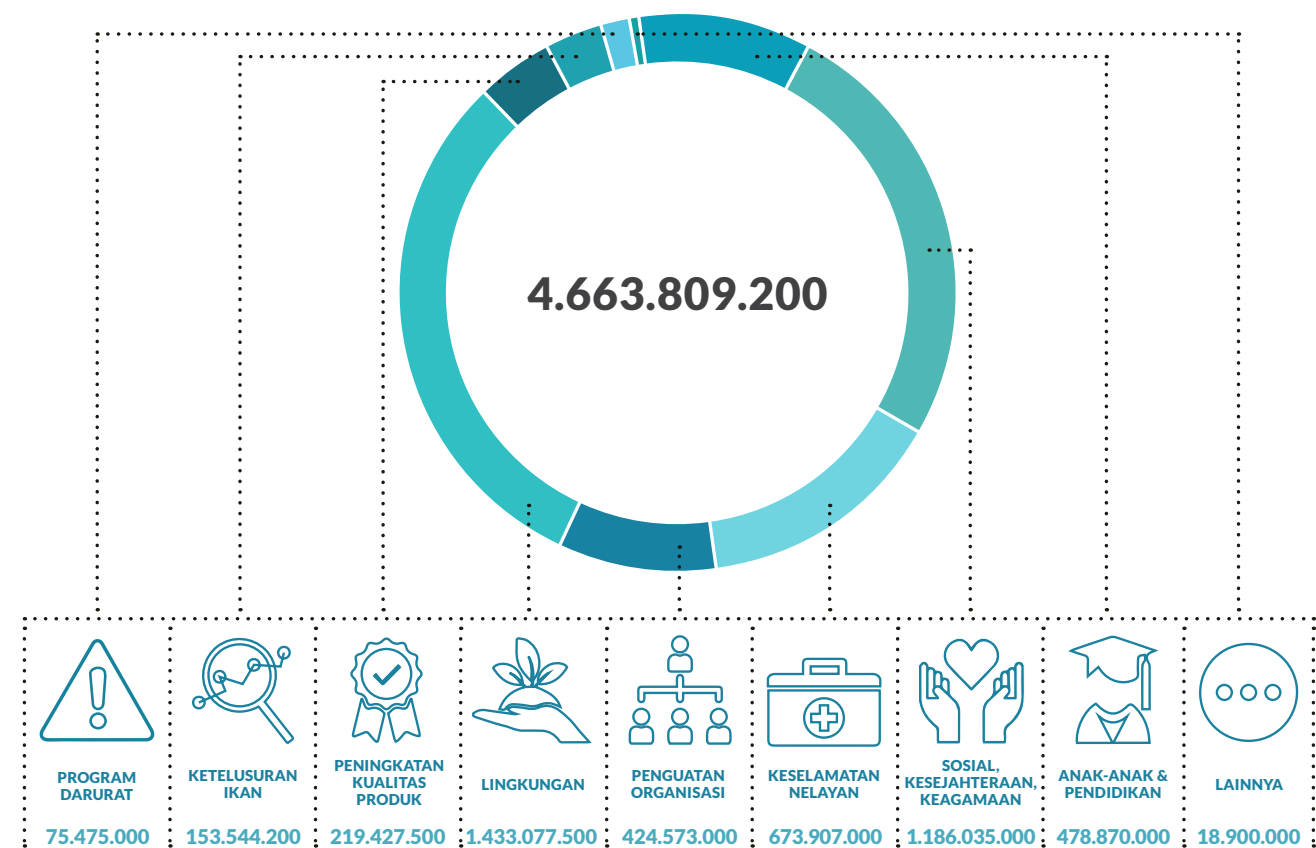
PERENCANAAN PROGRAM PREMIUM & DANA PREMIUM FAIR TRADE

Melalui program Fair Trade, kelompok nelayan yang telah terdaftar berhak mendapatkan insentif untuk setiap ikan yang dijual melalui rantai pasok Fair Trade. Agar kelompok nelayan dapat memanfaatkan Dana Premium, mereka harus berorganisasi. Setiap tahunnya, rapat Premium Plan dilaksanakan oleh kelompok nelayan Fair Trade sebagai pertemuan anggota kelompok dengan para pengurus untuk merencanakan penggunaan dana premium. Setelah beberapa tahun berdampingan dengan MDPI, saat ini pengurus kelompok mampu mandiri dalam memimpin rapat, terlebih pada kelompok nelayan yang menginjak tahun ke-enam dalam implementasi Fair Trade.

Rapat Premium Plan tahun 2021 telah dilaksanakan oleh 21 kelompok nelayan Fair Trade di Buru, Seram, Sanana, dan Toli-Toli untuk merencanakan program periode tahun ini menggunakan Dana Premium sejumlah Rp 977.718.500. Hasil rapat kelompok kemudian disampaikan pada rapat komite masing-masing daerah yang tahun ini menyepakati sejumlah total 123 program lingkungan dan 38 program non-lingkungan untuk dijalankan oleh 21 kelompok di empat wilayah implementasi Fair Trade tersebut.

Beberapa Program Premium yang dijalankan juga menjadi bagian dari upaya kelompok untuk memenuhi standar sertifikasi Fair Trade yang mereka pegang. Tahun ini, Fair Trade USA merilis *Capture Fisheries Standard* (CFS) 2.0 sebagai standar sertifikasi terbaru yang menjadi acuan bagi seluruh rantai pasok perikanan pemegang sertifikat. Untuk memastikan bahwa seluruh standar sertifikasi telah benar terpenuhi, audit Fair Trade dilakukan setiap tahun bersama nelayan, pemasok, dan perusahaan pengolah, dan tahun ini MDPI merupakan *pilot project* pertama pelaksanaan audit yang mengacu pada standar baru tersebut. Sebelum audit dijalankan, MDPI mendampingi kelompok nelayan yang akan diaudit agar amampu menjawab dan menyediakan data-data yang diperlukan oleh auditor nantinya. Berdasarkan penilaian auditor, sebagian besar pihak terlingkup Fair Trade di lokasi dampingan MDPI cukup memahami dan mengimplementasi standar Fair Trade.

PENYERAPAN DANA PREMIUM FAIR TRADE 2019-2021 (DALAM IDR)





NELAYAN TUNA UNTUK PERIKANAN BERKELANJUTAN “MARI REHAT SEHARI”

Bersama dengan komunitas perikanan di seluruh dunia, MDPI menggunakan momentum WFD untuk menyuarakan pentingnya kesehatan ekosistem laut dan keberlanjutan stok ikan. WFD dirayakan setiap tahun pada bulan November di semua wilayah kerja MDPI bersama komunitas nelayan dampingan yang mengadakan beragam kegiatan sosial. Sepanjang momentum WFD tahun ini, MDPI didukung oleh para nelayan dampingan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat seputar pentingnya kesehatan ekosistem dan stok ikan bagi perikanan berkelanjutan.

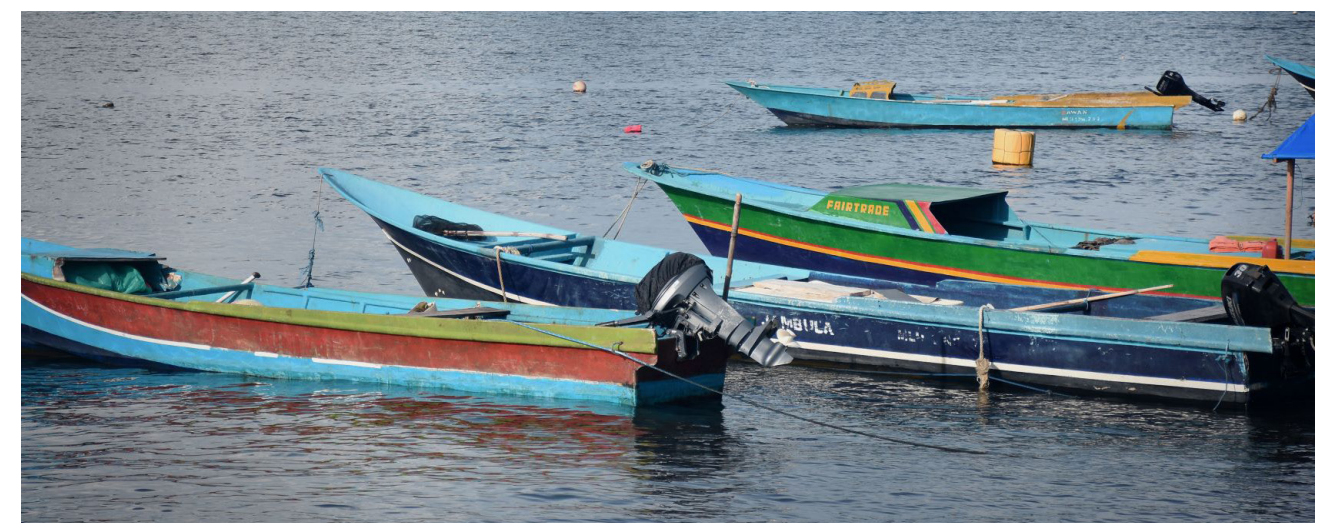
Selain sosialisasi oleh para nelayan, rangkaian kegiatan lainnya termasuk sesi berbagi informasi dan data bersama nelayan, bersih-bersih pantai, sosialisasi, pemutaran film, dan beragam lomba untuk menghibur seluruh lapisan masyarakat.

Dari data yang dihimpun oleh MDPI, terdapat indikasi bahwa ukuran ikan tuna yang berhasil ditangkap mulai

Sejumlah kelompok nelayan di wilayah kerja MDPI memperingati Hari Perikanan Sedunia 2021 dengan menyuarakan ajakan istirahat sehari menangkap ikan setiap minggu, atau 52 hari dalam setahun, demi membantu upaya perbaikan stok ikan secara alami.

mengecil dan nelayan kecil harus semakin jauh menangkap, sehingga waktu melaut makin lama dan biaya bahan bakar membengkak. Inilah tanda-tanda dari menurunnya hasil tangkapan yang perlu diwaspadai oleh nelayan-nelayan kecil yang memiliki keterbatasan dibanding kapal besar.

Karena nelayan sangat tergantung pada laut, ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan agar menjamin bisa dapat ikan. Penangkapan harus teratur dan ramah lingkungan, tidak mengganggu satwa yang dilindungi seperti lumba-lumba, penyu, dan hiu, juga tidak membuang sampah di laut, dan mematuhi prinsip perikanan berkelanjutan lainnya. Situasi perikanan ini turut dijelaskan oleh para nelayan champion MDPI kepada nelayan lain yang hadir di sesi diskusi saat perayaan WFD tahun ini.



Nelayan pada umumnya mengambil satu hari untuk istirahat, biasanya untuk membersihkan kapal dan beribadah di hari Jumat. Secara logika sederhana, dengan beristirahat satu hari setiap minggu, maka satu orang nelayan bisa memberikan kontribusi terhadap konservasi untuk setidaknya satu ekor ikan di laut yang tidak ditangkap. Jika nelayan Fair Trade berjumlah sebanyak 682 orang, maka akan terdapat 682 ekor tuna yang tidak tertangkap dalam seminggu atau setara dengan 17.050 kg (asumsi rata-rata berat tuna 25 kg/ekor), atau setara dengan 35.464 ekor tuna yang setara dengan 886.600 kg dalam setahun.

Jumlah tersebut merupakan kontribusi nelayam yang sangat besar untuk pemulihan stok ikan secara alami. Harapannya, dengan beristirahat melaut satu hari, selain memberikan waktu istirahat untuk nelayan, sumber daya perikanan juga dapat memiliki waktu untuk pulih kembali dan bertambah banyak.

PENGGERAK EKOSISTEM PERIKANAN

Selain memperbaiki tata kelola perikanan, MDPI juga memastikan bahwa masyarakat pesisir dapat terus berkembang. Selain membangun kemitraan, kami turut membangun kepemimpinan di tengah masyarakat.



Menetap di Dusun Baran Tapan Asri, Desa Seruni Mumbul, Lombok Timur, awalnya beliau berprofesi sebagai nelayan tuna di kapal besar yang melaut sehari-hari. Kini sebagai nelayan kecil Muslimin hanya melaut selama 4–6 jam menggunakan kapal seukuran 1 GT. Pada tahun 2013, Muslimin menginisiasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Harapan Jaya yang beranggotakan 20 orang, namun baru berhasil mulai menjalankan usaha di tahun 2020. Muslimin selaku Ketua KUB saat itu mulai sering terlibat dalam pengelolaan perikanan, di antaranya pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di tingkat lokal dan regional. Awalnya tergolong pribadi yang minim suara, kini beliau mulai lebih berani berbicara di depan umum dan rutin mengadakan rapat anggota untuk memastikan

komunikasi dan penyebaran informasi antar anggota kelompok berjalan lancar. Proses ini membawa banyak perkembangan positif bagi individual dan kelompok nelayan, hingga akhirnya mereka percaya diri untuk mengubah KUB menjadi koperasi di akhir tahun 2021, dengan Muslimin yang kembali dipercaya menjadi Ketua Koperasi.

Sebagai salah satu anggota kelompok nelayan Fair Trade, Aswat Jamaluddin menjadi salah satu motor penggerak implementasi program Fair Trade USA di Pulau Bisa, Maluku Utara. Sejak bergabung dengan kelompok nelayan Tuna Jaya di tahun 2017, beliau memiliki motivasi tinggi untuk membantu memperbaiki pengelolaan perikanan di daerahnya. Seiring dengan waktu, melalui keterlibatan rutin di setiap kegiatan MDPI, Aswat turut membangun kepercayaan diri dalam berorganisasi dan berbicara, serta mengembangkan pola berpikir kritis dalam hal perikanan berkelanjutan. Kini beliau menjadi salah satu nelayan Champion MDPI yang memiliki kapasitas untuk mendampingi nelayan lainnya di Pulau Bisa, terlebih lagi dalam hal monitoring dan evaluasi Program Premium FT. Dipercaya sebagai perwakilan Komite FT, Aswat bertugas meninjau program premium, menjadi penghubung antara kelompok dan supplier, serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan di kelompok. Meski belum berkesempatan menjadi perwakilan di forum regional ataupun nasional, nelayan tuna dari Desa Madapolo ini tetap semangat menjadi pembawa perubahan di desanya dan menjadi promotor setiap kegiatan yang diadakan MDPI ataupun Pemerintah Desa, contohnya dalam mengkoordinir nelayan untuk menyukseskan kegiatan perayaan Hari Perikanan Sedunia yang diadakan setiap tahun di seluruh wilayah dampingan MDPI. Sebagai pribadi yang peduli akan pendapat orang lain, didukung dengan tingkat pemahaman yang cukup mendalam tentang perikanan berkelanjutan dan pengelolaan perikanan, beliau mampu menjadi figur yang dapat memotivasi nelayan lain di sekitarnya.



membentuk sebuah koperasi sebagai wadah organisasi berbadan hukum. Didampingi oleh MDPI, didukung juga oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan, DKP Kabupaten Bone, dan Dinas Koperasi Kabupaten Bone, maka pada tahun 2020 terbentuklah Koperasi Kembali Muda Mandiri. Ibu Herna pun dipercayakan menjadi salah satu pengurus, tepatnya sebagai Bendahara Koperasi. “Dari koperasi, kami banyak belajar. Sebelumnya, kami jarang mencatat dan menulis, namun saat ini kami seakan mulai bersekolah lagi, karena harus melakukannya setiap hari. Kami juga belajar menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan yang didasari oleh proses diskusi,” ungkapnya. Dalam mengemban tugasnya, Ibu Herna aktif berpartisipasi dalam ragam kegiatan pelatihan dari dinas terkait, seperti pelatihan dari Dinas Koperasi dan menjadi perwakilan Koperasi dalam Pertemuan Regular Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Sulawesi Selatan. Selain itu, MDPI juga akan memberikan pelatihan kepada beliau terkait organisasi koperasi dan literasi keuangan.

Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Itulah prinsip yang dipegang oleh Ibu Hernawati, perempuan asli Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang tinggal di sebuah desa nelayan di Tanete Riattang Timur. Hidup di lingkungan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, termasuk suaminya, perempuan kelahiran Desa Tippulue ini kerap memimpikan adanya suatu wadah legal yang dapat merangkul masyarakat pesisir di sana, termasuk para istri nelayan yang sebagian besar adalah Ibu Rumah Tangga seperti dirinya. Wacana untuk membentuk wadah tersebut menjadi topik diskusi sehari-hari di tengah masyarakat dan, sebagai salah satu penggerak, Ibu Herna juga aktif menyuarakan hal ini di lingkaran istri nelayan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya beliau berhasil meyakinkan komunitas desa tersebut untuk



menjadi salah satu nelayan yang vokal dan kritis, beliau makin aktif terlibat langsung dalam pengelolaan perikanan, termasuk dalam penyusunan Fisheries Management Plan Provinsi Maluku untuk mengatur pengelolaan perikanan yang mengacu pada standar sertifikasi FT. Dipercaya menjadi perwakilan nelayan tuna Buru di berbagai forum diskusi, Umar pun turut aktif menghadiri pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di tingkat provinsi maupun nasional, bahkan menjadi narasumber untuk berbagai media publikasi, termasuk di beberapa video dokumenter dari badan sertifikasi Fair Trade dan Marine Stewardship Council. Umar yang saat ini menduduki beberapa jabatan di kelompok nelayan dan Komite FT Buru adalah seorang pemimpin yang tegas namun begitu mengayomi seluruh nelayan anggotanya, terutama dalam memastikan kelompok nelayan di bawah naungannya dapat merencanakan dan menggunakan Dana Premium dengan benar, mulai dari proses perhitungan hingga implementasi yang efektif untuk lingkungan dan sosial kemasyarakatan nelayan di sana. Pemerintah Desa pun turut mengakui kemampuan dan pengalaman Umar berorganisasi di kelompok FT dan mempercayakan posisi Kepala Seksi Pemerintahan kepada beliau, dengan harapan dapat terus membawa perubahan positif yang lebih signifikan lagi di Desa Waepure, Pulau Buru, Maluku.

Delapan tahun sudah Umar Papalia, salah satu nelayan tuna Fair Trade (FT) dari Pulau Buru, Maluku, berdampingan dengan MDPI. Saat pertama bergabung dengan program FT di tahun 2014, Umar mengaku faktor ekonomi memang menjadi motivasi terbesarnya, mengingat adanya keuntungan Dana Premium dari penjualan ikan yang tersertifikasi. Namun, seiring berjalannya waktu, Umar yang aktif terlibat dalam proses pemenuhan standar sertifikasi mulai paham akan nilai-nilai dasar FT, sehingga lebih menyadari pula pentingnya praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di balik pribadinya yang kalem, Umar adalah seorang nelayan Champion yang menjadi perpanjangan tangan MDPI dalam mendampingi kelompok nelayan di Desa Waepure dan sekitarnya. Kini

MEET THE TEAM

MDPI memiliki tim dengan beragam keahlian, namun disatukan oleh keinginan untuk membangun ekosistem perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Seluruh tim MDPI turut memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan juga dapat membawa manfaat bagi komunitas nelayan kecil.



Dari seluruh karyawan yang bekerja di MDPI, Wildan merupakan satu-satunya pioneer (pendiri) yang masih aktif dan setia mengabdikan diri di MDPI. Dia seorang pekerja keras, cerdas dan tuntas serta cukup teliti dalam memperhatikan semua aspek pekerjaannya. Meniti karirnya di MDPI, Wildan mengawali masa kerja sebagai Enumerator di Lombok Timur dan sejak 2017 sampai saat ini (5 tahun), beliau dipercaya sebagai Fishery Program Manager. Wildan merupakan tulang punggung keberhasilan pelaksanaan program perikanan di MDPI dan menjadi penghubung yang produktif antara pemerintah, industri maupun universitas serta pemangku kepentingan lainnya. Kunci keberhasilannya dalam berkarir hingga kemudian dipercaya sebagai manajer adalah kepribadian yang berintegritas dan karakter kepemimpinan yang mampu membangkitkan semangat kerja dalam tim yang dipimpinnya. Wildan pantas menjadi calon pemimpin masa depan yang produktif.

Ni Made Artini atau biasa dipanggil Bu Ar oleh teman-teman di MDPI adalah staf finance yang sudah bergabung dengan MDPI sejak tahun 2017. Tanggung jawab utama Bu Ar di bagian keuangan adalah melakukan transaksi pembayaran kepada internal staf MDPI maupun pihak eksternal (vendor, konsultan, bank, dll). Selain itu Bu Ar juga bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak, rekonsiliasi bank, produk investasi dan juga kas kecil baik di kantor Bali dan kantor-kantor MDPI di lapangan yang tersebar di 9 lokasi. Sebagai salah satu staff yang paling lama berada di tim finance MDPI, Bu Ar memahami alur keuangan di MDPI mulai penerimaan dana dari donor sampai ke proses pembayaran kepada pihak yang bekerja sama dengan MDPI. Bu Ar dikenal sebagai seorang yang teliti dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, hal ini sangat mendukung MDPI dalam menyediakan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



Sejak bergabung dengan MDPI pada tahun 2019, Bachori aktif mendukung keberhasilan program dan menunjukkan keinginan belajar dan membangun kapasitasnya. Bachori memulai karirnya sebagai Fair Trade Assistant dan sampai sekarang masih membantu dalam persiapan dokumen untuk kepentingan Audit Fair Trade, baik di tingkat nelayan maupun pabrik. Saat ini menjadi *Monitoring & Evaluation Officer*, tanggung jawabnya termasuk mengumpulkan informasi seputar kegiatan MDPI dan mengukur dampak yang dihasilkan. Dia juga mendukung tim MDPI dengan menyoroti pencapaian mereka dan mengidentifikasi pembelajaran untuk membangun budaya perbaikan diri. Salah satu bagian yang paling menarik dari pekerjaannya adalah melakukan perjalanan ke lapangan mengunjungi wilayah kerja MDPI dan mendapat kesempatan berinteraksi langsung dengan penerima manfaat di enam provinsi tempat kami bekerja. Dengan komitmennya terhadap visi dan misi MDPI, Bachori percaya bahwa, "bekerja untuk kemajuan masyarakat pesisir menambah kesempurnaan dalam hidup." Pribadi yang positif dengan inisiatif, dan fleksibilitasnya, sangat membantunya dalam membangun hubungan yang kuat di tengah seluruh tim, dan menjadikannya anggota MDPI yang berharga dan tepercaya.



Bergabung di MDPI sejak tahun 2015, saat ini Amrollah adalah Site Leader untuk wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi. Sifatnya yang lemah lembut namun berani mencoba hal baru menjadi ciri khasnya di MDPI, di mana ia akrab dikenal sebagai "Ezhy". Sejauh ini, dia telah bertugas di 5 provinsi yang menjadi wilayah kerja MDPI, sehingga memiliki pengalaman beragam mulai dari pengumpulan data, co-management, pendampingan nelayan Fair Trade, Fisheries Improvement Program, juga penguatan komunitas kelompok nelayan. Pengalamannya yang begitu lengkap menjadikannya salah satu anggota tim MDPI yang dipercaya untuk mengatur wilayah kerja lintas-provinsi yaitu NTT, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Ezhy percaya bahwa, "Bertindak lokal dan segera bekerja, lebih baik daripada sebatas memikirkannya saja." Kesederhanaan dan kemampuan beradaptasi dengan cepat turut menjadi nilai yang dipegang dalam kesehariannya, membuatnya mudah diterima oleh komunitas nelayan dampingan sehingga banyak menyukseskan kegiatan-kegiatan besar di wilayah kerja MDPI.

SITE LEADERS: KOORDINATOR WILAYAH

Sejak tahun 2021, enam provinsi wilayah kerja MDPI dibagi menjadi tiga wilayah koordinasi yang dipimpin oleh tiga Site Leader MDPI: Amrollah (Sulawesi & Nusa Tenggara), Sri (Maluku), dan Rahman (Maluku Utara).



SEWINDU MELAJU: MDPI 8 TAHUN!



Genap 8 tahun MDPI berdampingan dengan masyarakat perikanan skala kecil di perairan timur Indonesia. Perjalanan panjang dan menantang, namun keinginan untuk terus meningkatkan kesejahteraan para nelayan kecil dan masyarakat pesisir menjadi motivasi untuk terus melaju dan berusaha menjadi lebih baik.

PLATFORM DISKUSI BERSAMA NELAYAN

Salah satu misi MDPI adalah menyediakan wadah bagi para nelayan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah, untuk membahas berbagai masalah perikanan. Selain pertemuan rutin KPBP di tingkat provinsi, MDPI juga menggunakan platform webinar untuk menghubungkan nelayan skala kecil dengan seluruh *stakeholder*.

Mengangkat topik khusus seperti Perizinan Rumpon dan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA), seri webinar yang diadakan dalam rangka ulang tahun MDPI ke-8 menghadirkan perwakilan KKP sebagai narasumber dan turut menjadi kesempatan bagi nelayan kecil untuk menerima informasi dan melakukan tanya-jawab bersama pembuat kebijakan.

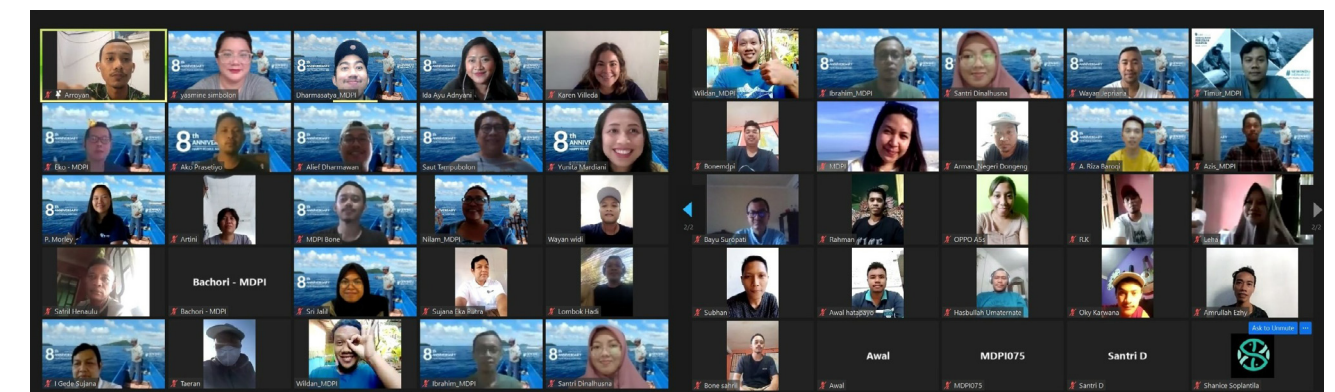
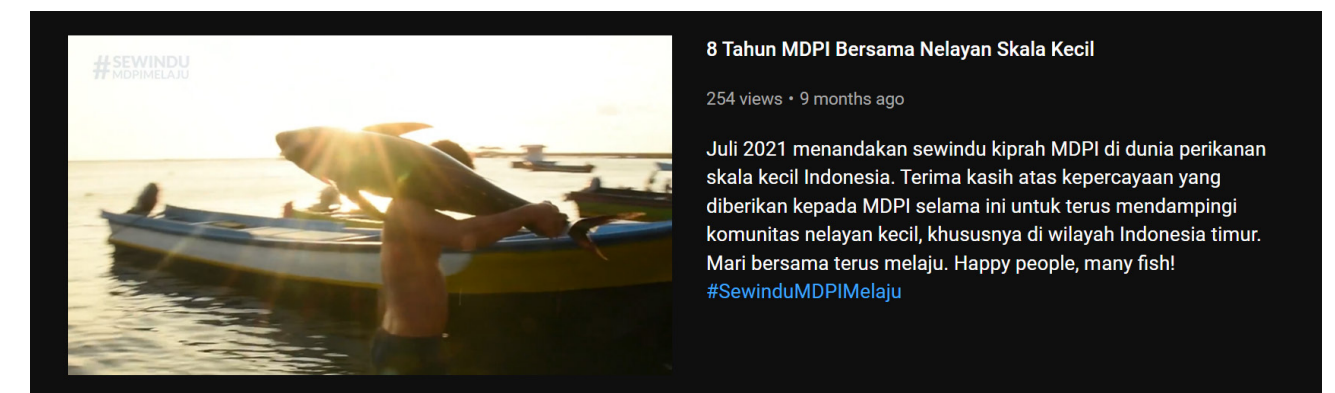
Bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSKP), rangkaian diskusi webinar meliputi hal mendasar seputar rumpon, proses pengurusan perizinan rumpon hingga prosedur teknis pendaftarannya, serta penjabaran mengenai STELINA sebagai salah satu solusi dalam memerangi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia.

Di bulan September MDPI kembali mengadakan sesi webinar, kali ini seputar Perizinan Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal berukuran ≤30 GT dan beroperasi di atas 12 mil laut. Rangkaian webinar dapat ditonton melalui: youtube.com/mdpifoundation.



8 TAHUN MDPI BERSAMA NELAYAN: APA KATA MEREKA?

Komunitas pesisir dampingan MDPI merupakan motivasi terbesar kami dalam bekerja. Tahun ini kami merayakan ulang tahun dengan serangkaian kalimat menyentuh dari para nelayan, beberapa di antaranya telah bekerja bersama MDPI sejak awal yayasan ini terbentuk. Kami berharap untuk dapat terus berkembang, bahkan memperluas jangkauan kerja agar dapat memberikan dampingan kepada lebih banyak lagi nelayan skala kecil di Indonesia. Video testimoni nelayan dapat ditonton di kanal YouTube MDPI: youtube.com/mdpifoundation.



VIRTUAL ANNUAL GATHERING

Pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung membuat tim MDPI absen dari agenda tahunan: *annual gathering* di Bali pada akhir tahun. Namun, bukan berarti pertemuan tahunan ini harus dibatalkan total. Dengan semangat perayaan ulang tahun MDPI, tepat pada tanggal 31 Juli seluruh tim dari penjuru wilayah kerja tetap berusaha bertatap muka melalui Zoom, lengkap dengan persediaan cemilan dan kue di lokasi masing-masing untuk mengikuti rangkaian acara dan permainan yang dirancang khusus untuk pertemuan virtual ini! #SewinduMDPIMelaju!



IN OTHER NEWS...

PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Menyadari pentingnya kepemimpinan yang baik dalam sebuah organisasi, MDPI mengajak MDF Pacific-Indonesia untuk memberikan Pelatihan Kepemimpinan dan Mengelola Sumber Daya Manusia. Pelatihan yang diadakan pada akhir November di Bali tersebut berlangsung selama 5 hari, membekali 20 staf MDPI dengan pengetahuan dan keterampilan mendalam terkait kepemimpinan dan mengelola sumber daya. Beberapa fokus pelatihan termasuk penerapan strategi kepemimpinan yang efektif, menemukan cara untuk memengaruhi tim, mengidentifikasi dan meningkatkan gaya kepemimpinan pribadi, mengembangkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan dalam memotivasi dan melatih, serta mengelola stres. Metode pembelajaran interaktif dengan gaya baru yang digunakan selama pelatihan ini sangat dinikmati oleh seluruh peserta, juga membantu mempertahankan minat dan fokus mereka sepanjang sesi, serta mempermudah mereka dalam memahami berbagai konsep dan topik yang disuguhkan.

WEBINAR PENTINGNYA MENJAGA KESEHATAN MENTAL

Untuk dapat menjadi pribadi yang unggul, adaptif dan siap menghadapi berbagai situasi psikologis, MDPI menyadari bahwa mengenali dan menangani kesehatan mental setiap individu merupakan hal penting yang dapat mendukung performa kerja yang maksimal. MDPI juga memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, oleh karena itu Sesi Berbagi MDPI kali ini mengangkat topik seputar cara menjaga kesehatan mental, khususnya di masa pandemi ini. Mengingat juga bahwa topik ini masih belum banyak dibicarakan masyarakat kita, Sesi Berbagi yang rutin dilaksanakan MDPI secara internal kali ini diadakan secara live streaming bersama Pulih at The Peak dan dapat diakses oleh umum melalui media sosial MDPI (Instagram, Facebook, YouTube).





MAINTAIN OUR MENTAL HEALTH –

Stress management, Self Care & Peer support

TIM KERJA MDPI

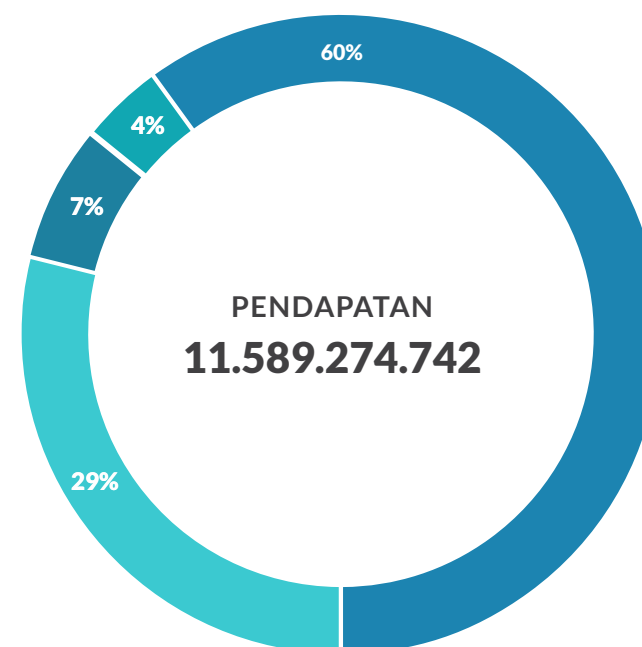
STAFF

A. Riza Baroqi	Hasbullah Umaternate
Adjie Dharmasatya	Hizran Sampalu
Agnesia Dau	I Wayan Widiartara
Agustina Nilam Ratnawati	Ibrahim Tauhid
Akhmad Fauzi	Ida Ayu Adnyani
Ako Prasetyo	Iksan Bessy
Alief Dharmawan	Juliette Ezdra
Amrollah	Kai Garcia Neefjes
Ardan Firmansyah	Karel Yerusu
Arroyan Suwarno	Karen Tatiana Villeda Ortiz
Arsandy A Kaledupa	La Djamali
Asis Buton	Maqfir Muhammad Papalia
Awaludin Hatapayo	Marselo Rivaer Manzanaris
Bachori Dhian Pratama	Marwan Adam
Bismirkin Hasja Marasabessy	Muh. Alwi
Dewi Nurmala Sari	Muhamad Arman Ahmad
Eko Octavianus Chalim	Muhammad Subhan Murid
Hairul Hadi	Muhammad Taeran
Hajerah Sufiani	Ni Made Artini
Halid Sanahuyo	Ni Wayan Crisnawati Sugana

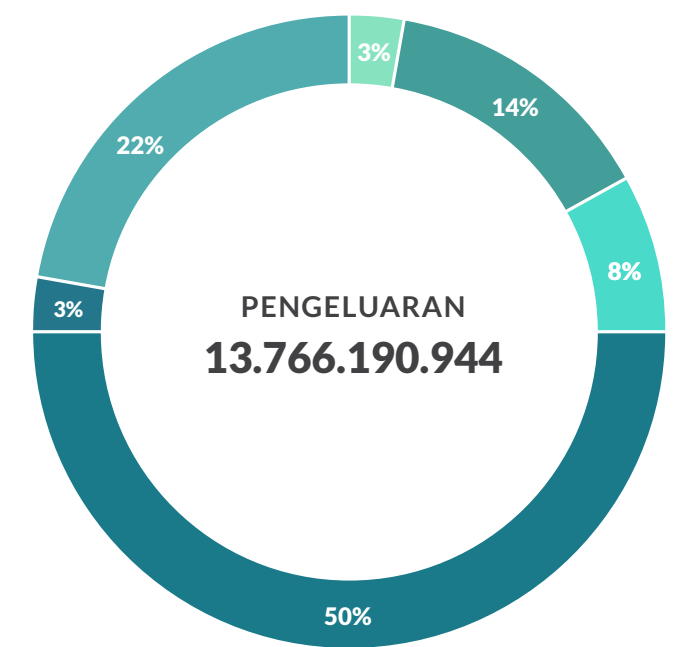
INTERN

Novita Ayu Wulandari	Tri Wahyuni Tomagola
Nur Elviani Marasabessy	Ilsan Ismail
Onya Debi Sriyanti Ely	Siti Utami Pratiwi
Prisillia Morley Loijens	Kusuma Amir
Putra Satria Timur	Putu Hardayani Utami
Rahman Pelu	Sonya Theresia Rajaguguk
Rui Xavier Nunes	Nor Aisyah Adnan
Safir Henaulu	Maria Magdalena Mau Ngai
Sahril	Ni Wayan Meyla Anjani Mahaswari
Santri Dinalhusna	Marlita Fitri Yustiyana
Saut Tampubolon	
Siti Zulaeha	
Sri Sumiati Jalil	
Sufira Audila Morotiya	
Teo Andri Saputra	
Wildan	
Yasmine Simbolon	
Yunita Mardiani	

LAPORAN KEUANGAN



- Foundation
- Industry
- Public Funding & Multilateral
- Others



- Fundraising
- Fair Trade
- Community Development
- Fisheries Program
- Supply Chain
- Operational





Laporan Tahunan 2021
Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia
www.mdpi.or.id